



## GUBERNUR SUMATERA UTARA

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara  
di –  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 000.3.1 / 4633 / 2025

### TENTANG

#### IMPLEMENTASI *E-PURCHASING* PADA KEGIATAN STRATEGIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK R.I. Nomor B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025, maka perlu segera mengimplementasikan *e-Purchasing* pada Kegiatan Strategis Daerah Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Teknis *e-Purchasing* yang bertugas untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Melaksanakan evaluasi/reviu spesifikasi teknis pada kegiatan pengadaan barang/jasa melalui *e-Purchasing* yang terdiri dari kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan (berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah), karakteristik, dan kualitas;
3. Mengumpulkan referensi harga pada kegiatan pengadaan barang/jasa melalui *e-Purchasing* dengan membandingkan harga pasar, kontrak sejenis, atau sumber lainnya;
4. Melaksanakan evaluasi/reviu rancangan kontrak (Surat Pesanan atau Surat Perjanjian) yang mencakup :

- a) Kelengkapan (paket pengadaan, sumber dana, nilai kontrak, jenis kontrak, dan waktu pelaksanaan);
  - b) Syarat umum dan khusus;
  - c) Kesesuaian dokumen kontrak dengan persyaratan lainnya;
5. Melakukan evaluasi/reviu terhadap rencana metode pemilihan (negosiasi, mini kompetisi atau kompetisi katalog);
  6. Menyiapkan berita acara pemilihan calon penyedia jasa melalui *e-Purchasing* (minimal 3 penyedia) yang memuat data umum pekerjaan, item pekerjaan, perbandingan masing-masing calon penyedia dari sisi teknis, harga, maupun fasilitas lainnya yang mampu disediakan, dan verifikasi penyedia jasa (memenuhi/tidak memenuhi);
  7. Mempersiapkan berita acara hasil pemeriksaan untuk serah terima barang/pekerjaan untuk paket non konstruksi;
  8. Mempersiapkan Pakta Integritas pelaksanaan pengadaan barang/jasa berintegritas Tahun 2025 yang ditandatangani PA, KPA, PPK, PPTK, dan Pejabat Pengadaan pada seluruh Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dipedomani.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 27 Mei 2025

Gubernur Sumatera Utara,



Muhammad Bobby Aff Nasution

Lampiran Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara

Nomor : 000.3.1 / 4633 / 2025

Tanggal : 27 Mei 2025

Tentang : Implementasi *E-Purchasing* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

1. Kertas Kerja Evaluasi Spesifikasi Teknis

NO	KEGIATAN	HASIL
1.	Memastikan spesifikasi teknis telah dituangkan dengan lengkap sehingga peserta memahami dan mampu menyusun penawaran dengan baik	
2.	Memastikan spesifikasi teknis telah dijabarkan dengan: a. Kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan b. Karakteristik, antara lain ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dst. c. Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dst. d. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO, dst. e. Validitas: standar yang digunakan sudah tepat dan sesuai (SNI masih berlaku dan masih valid diberlakukan). f. Pengemasan dan cara pengiriman disesuaikan dengan sifat dan/ atau jenis barang g. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait spesifikasi teknis	

2. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Pengumpulan Referensi Harga

NO	KEGIATAN	HASIL
1.	Memastikan PPK telah mengumpulkan referensi harga yang cukup dan memadai sehingga dapat menjadi dasar penentuan harga.	
2.	Memastikan harga yang digunakan PPK relevan dengan harga pasar, kontrak sejenis yang pernah dilakukan, atau sumber lainnya.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait referensi harga	

### 3. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Rancangan Kontrak (Surat Pesanan dan/ atau Surat Perjanjian Kerja)

NO	KEGIATAN	HASIL
1.	Memastikan SPK telah dituangkan secara lengkap dan benar terkait dengan: a. Paket pengadaan b. Sumber dana c. Nilai kontrak termasuk pajak d. Jenis kontrak e. Waktu pelaksanaan	
2.	Memastikan syarat-syarat umum dan syarat- syarat khusus kontrak.	
3.	Memastikan jenis kontrak dalam SPK sudah sesuai dengan dokumen persiapan lainnya	
4.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait rancangan kontrak	

### 4. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Rencana Metode Pemilihan Penyedia

NO	KEGIATAN	HASIL
1.	Memastikan PPK telah menentukan metode pemilihan penyedia	
2.	Memastikan kesesuaian metode pemilihan penyedia yang dipilih PPK dengan ketentuan: a. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas produk, ongkos kirim, biaya instalasi, mobilisasi, SMKK, dan ketersediaan produk. b. Mini kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih penyedia katalog elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/ PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik; atau c. Competitive Catalogue memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompertisikan melalui sistem.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait metode pemilihan penyedia	

5. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Perhitungan Perkiraan Anggaran Biaya (khusus pekerjaan konstruksi)

NO	KEGIATAN	HASIL
1.	Memastikan nilai total perkiraan Anggaran Biaya tidak melebihi pagu anggaran	
2.	Memastikan unsur pembayaran telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan lingkup pekerjaan.	
3.	Memastikan nilai total perkiraan Anggaran Biaya telah memperhitungkan kewajiban pajak.	
4.	Memastikan kesesuaian hasil perhitungan harga satuan terhadap kuantitas yang dibutuhkan (apabila harga satuan).	
5.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait perhitungan perkiraan anggaran biaya.	

6. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Detailed Engineering Design (DED), khusus pekerjaan konstruksi

NO	KEGIATAN	HASIL
1.	Memastikan DED telah dituangkan secara lengkap, sehingga memungkinkan bagi peserta untuk memahami dan mampu menyusun penawaran dengan baik.	
2.	Memastikan DED telah menguraikan: a. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO, dll. b. Validitas: Standar yang digunakan sudah tepat dan sesuai (SNI masih berlaku dan masih valid) c. Metode pelaksanaan harus logis, realistis, dan dapat dilaksanakan.	
3.	Memastikan kesesuaian antara spesifikasi teknis dan gambar secara rinci, lengkap, dan jelas.	
4.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan reviu terkait Detailed Engineering Design (DED).	

7. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Rencana Penetapan Uang Muka dan Jaminan Uang Muka, khusus pekerjaan konstruksi

NO	KEGIATAN	HASIL
1.	Memastikan apakah ada uang muka.	
2.	Memastikan apakah dibutuhkan jaminan uang muka.	
3.	Memastikan nilai uang muka dan/ atau jaminan uang muka telah sesuai dengan ketentuan.	
4.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan penetapan uang muka dan jaminan uang muka.	

8. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Rencana Jaminan Pelaksanaan, khusus pekerjaan konstruksi

NO	KEGIATAN	HASIL
1.	Memastikan apakah diperlukan jaminan	
2.	Memastikan apakah nilai jaminan pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan rencana jaminan pelaksanaan	

9. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Rencana Jaminan Pemeliharaan/Retensi, khusus pekerjaan konstruksi

NO	KEGIATAN	HASIL
1.	Memastikan apakah diperlukan jaminan pelaksanaan/ retensi.	
2.	Memastikan apakah nilai jaminan pemeliharaan/ retensi telah sesuai dengan ketentuan.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan rencana jaminan pemeliharaan/ retensi.	

10. Kertas Kerja Evaluasi terhadap Ketersediaan Produk di Katalog Elektronik

NO	KEGIATAN	HASIL
1.	Memastikan ketersediaan produk di katalog elektronik.	
2.	Memastikan berapa banyak penyedia katalog yang menyediakan produk yang akan di- purchase.	
3.	Hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan ketersediaan produk di katalog elektronik.	

**PAKTA INTEGRITAS  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BERINTEGRITAS**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun 2025 bertempat di ....., dengan menjunjung tinggi nilai integritas dan penuh kesadaran, saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan komitmen untuk melaksanakan *e-purchasing* secara transparan, akuntabel, tidak melakukan praktik suap/gratifikasi/pemerasan, penyalahgunaan kewenangan atau praktik korupsi lainnya.

Apabila dalam pelaksanaan *e-purchasing* diketahui melakukan dan/atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Yang bertanda tangan,  
*PA, KPA, PPK, PPTK, dan Pejabat Pengadaan  
Perangkat Daerah*

*Materai*

( Nama Lengkap )  
NIP.